



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1406/SEK/KU.04.2/9/2019 26 September 2019
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Bawas atas
Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawasan atas Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2019, khususnya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bersama ini kami sampaikan bahwa dari CHR tersebut terdapat daftar catatan yang harus dilakukan tindak lanjut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, berikut adalah daftar catatan hasil reviu yang harus dilakukan tindak lanjut, yaitu:

1. Terdapat estimasi PNBP yang masih menggunakan akun penerimaan lama dan estimasi PNBP yang tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung;
2. Terdapat realisasi PNBP yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung;
3. Terdapat PNBP Umum yang disetorkan pada DIPA 03, DIPA 04, dan DIPA 05;
4. Terdapat PNBP Fungsional yang ada pada UAPPA-E1 BUA (BUA).

Atas beberapa catatan hasil reviu tersebut, diminta kepada saudara untuk segera melakukan koreksi/perbaikan dengan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Selanjutnya untuk seluruh proses pelaksanaan koreksi/perbaikan beserta surat pernyataannya agar segera dikirim ke Biro Keuangan c.q. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk *soft copy* (.pdf) melalui email keuangan.pnbp@yahoo.co.id paling lambat diterima tanggal 4 Oktober 2019 sebagai dasar telah dilakukan tindak lanjut Catatan Hasil Reviu Bawas atas Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2019 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,
atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,



Tembusan:

1. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1406/SEK/KU.04.2/9/2019
Tanggal : 26 September 2019

DAFTAR SATUAN KERJA

No	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN
1	PT Bangka Belitung	PTA Jakarta	PTUN Jambi
2	PN Jakarta Timur	PA Padang Panjang	PTUN Ambon
3	PN Toli Toli	PA Sungai Penuh	
4	PN Tasikmalaya	PA Tanjungkarang	
5	PN Buol	PA Krui	
6	PN Kota Agung	PA Mempawah	
7	PN Cirebon	PA Sukamara	
8	PN Surabaya	PA Kuala Pembuang	
9	PN Bulukumba	PA Kasongan	
10	PN Kotamubago	PA Sendawar	
11	PN Sidenreng Rappang	PA Wamena	
12	PN Selayar	PA Muara Sabak	
13	PN Pandeglang	PA Bengkulu	
14	PN Sangata	PA Banjarnegara	
15	PN Jakarta Utara	PA Pontianak	
16	PN Malili	PA Arso	
17	PN Polewali	PA Mamuju	
18	PN Pasarwajo	PA Pematang Siantar	
19	PN Banjarmasin	PA Labunan Bacan	
20	PN Ambon	PA Kota Tasikmalaya	
21	PN Singaraja		
22	PN Bogor		
23	PN Yogyakarta		
24	PN Tanjungpinang		
25	PN Sungguminasa		
26	PN Fak Fak		
27	PN Prabumulih		
28	PN Pangkalan Balai		
29	PN Pekalongan		
30	PN Bukit Tinggi		
31	PN Jeneponto		

**DAFTAR SATUAN KERJA PADA CATATAN HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN
 ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER I TA 2019
 TERKAIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

No	Catatan Hasil Reviu	Akun	Satker	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Laporan Realisasi Anggaran					
1	Terdapat estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masih menggunakan akun penerimaan lama dan estimasi PNBPN yang tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung RI	421141 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.792.000,-	a) PN Jakarta Timur sebesar Rp45.000.000,- b) PA Padang Panjang sebesar Rp792.000,-	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk melakukan revisi DIPA terhadap estimasi PNBPN yang masih menggunakan akun penerimaan lama dan estimasi PNBPN yang tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung menjadi akun estimasi PNBPN sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531-PB- 2018 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar	
		423151 - Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola	PN Toli Toli sebesar Rp600.000,-		
		423411 - Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan sebesar Rp5.064.000,-	a) PN Tasikmalaya sebesar Rp385.000,- b) PN Buol sebesar Rp175.000,- c) PA Sungai Penuh sebesar Rp204.000,- d) PA Tanjungkarang sebesar Rp800.000,- e) PA Krui sebesar Rp3.000.000,- f) PA Mempawah sebesar Rp500.000,-		
		423412 - Pendapatan Pengesahan Surat di bawah tangan yang dialokasikan sebesar Rp14.075.000,-	a) PN Tasikmalaya sebesar Rp1.465.000,- b) PN Cirebon sebesar Rp1.705.000,- c) PN Surabaya sebesar Rp10.600.000,- d) PN Bulukumba sebesar Rp150.000,- e) PN Buol sebesar Rp155.000,-		
		423413 - Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan sebesar Rp10.249.000,-	a) PN Cirebon b) PN Kotamubago c) PN Sidenreng Rappang d) PN Bulukumba e) PN Selayar f) PN Pandeglang g) PN Sangata h) PN Buol i) PN Malili j) PA Sendawar k) PA Mempawah		

		<p>423415 - Pendapatan Ongkos Perkara yang dialokasikan sebesar Rp180.215.000,-</p> <p>423419 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp192.065.000,-</p> <p>425235 - Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi</p> <p>425359 - Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya</p> <p>425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/jasa Giro sebesar Rp103.000.000,-</p>	<p>a) PN Tasikmalaya b) PN Cirebon c) PN Surabaya d) PN Kotamubago e) PN Bulukumba f) PN Pandeglang g) PN Kota Agung h) PN Sangata i) PN Buol j) PN Pasarwajo k) PA Sukamara l) PA Kuala Pembuang m) PA Kasongan n) PA Sendawar o) PA Sungai Penuh p) PA Mempawah q) PA Wamena</p> <p>a) PN Pandeglang b) PN Tasikmalaya c) PN Cirebon d) PN Surabaya e) PN Bulukumba f) PN Sangata g) PN Pasar Wajo h) PA Sendawar i) PA Sungai Penuh j) PA Mempawah k) PA Wamena</p> <p>PN Jakarta Utara sebesar Rp36.000.000,-</p> <p>PA Muara Sabak sebesar Rp4.902.000</p> <p>a) PN Banjarmasin b) PN Ambon c) PN Singaraja</p>		
--	--	---	--	--	--

2	Terdapat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung RI	425719 - Pendapatan Bunga Lainnya sebesar Rp544.082,-	a) PN Bogor Rp500.000,- b) PA Bengkulu Rp44.082,-	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk melakukan koreksi data terhadap realisasi PNBP yang tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung menjadi akun PNBP sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-154/PB/2019	
		425999 - Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp642.015,-	a) PN Yogyakarta b) PN Tanjungpinang c) PN Sungguminasa d) PN Fak Fak e) PA Banjarnegara f) PA Pontianak g) PT Bangka Belitung h) PN Prabumulih i) PA Arso j) PN Pangkalan Balai k) PA Mamuju l) PA Pematang Siantar		
		425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro sebesar Rp354.414.900,-			
3	Terdapat PNBP Umurn yang disetorkan pada DIPA 03, DIPA 04 dan DIPA 05	425131 - Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	a) PA Labunan Bacan Rp270.000,- b) PA Kota Tasikmalaya Rp5.500.900,- c) PN Pekalongan Rp1.746.000,- d) PN Bukit Tinggi Rp750.000,- e) PN Jeneponto Rp50.000,- f) PN Polewali Rp200.000,-	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk melakukan koreksi data Unit Eselon 1 pada realisasi PNBP Umum yang disetorkan pada DIPA 03, DIPA 04 dan DIPA 05 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya	
		425129 - Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	a) PTA Jakarta sebesar Rp7.001.090,- b) PTUN Jambi sebesar Rp2.100.000,-		
4	Terdapat realisasi PNBP fungsional yang ada pada UAPPA-E1 BUA (BUA)	425233 - Pendapatan Ongkos Perkara	PA Bengkulu sebesar Rp4.710.000,-	Badan Pengawasan merekomendasikan untuk melakukan koreksi data Unit Eselon 1 pada realisasi PNBP fungsional yang ada pada UAPPA-E1 BUA (BUA) sesuai SK KMA Nomor 57/KMA/SK/III/2019	
		425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	PA Bengkulu sebesar Rp1.629.300,-		
		425231 - Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	PA Bengkulu sebesar Rp10.000,-		
		425232 - Pendapatan Uang Meja/Leges	a) PA Bengkulu sebesar Rp216.000,-, b) PTUN Ambon sebesar sebesar Rp3.000,-		

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Telah melakukan koreksi/perbaikan sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
2. Koreksi/perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan dari Biro Keuangan Mahkamah Agung;
3. Tidak akan mengulangi kesalahan serupa pada waktu yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....
Yang membuat pernyataan,
Sekretaris.....



.....
NIP.